



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Jl. Bina Praja Timur (Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan)

Banjarbaru ☎0511-3252319 📠0511-3253742

E-mail : pta.banjarmasin@gmail.com

Nomor : W15-A/1216/HM.01/5/2020
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Evaluasi ZI menuju
WBK/WBBM Tahun 2019

27 Mei 2020

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1879/DJA/HM.01/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal sebagaimana pada pokok surat, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

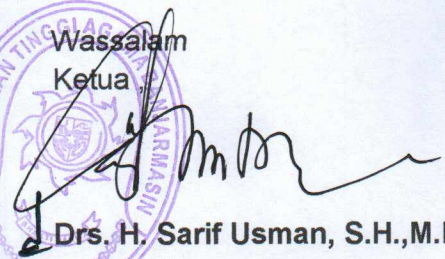
1. Pada saat desk evaluasi masih ditemukan belum terlihat pemahaman akan pembangunan Zona Integritas dari pimpinan dan seluruh anggota unit kerja, serta enam area perubahan dalam pengungkit/proses tidak dapat ditunjukkan dengan baik.
2. Hasil survei persepsi masyarakat tentang pelayan publik dan anti korupsi masih belum memenuhi kriteria minimum nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) / Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dikarenakan masih ditemukan persepsi masyarakat yang menyatakan terdapat ketidak jelasan tentang prosedur, persyaratan, biaya, waktu, penyelesaian waktu pelayanan dan respon petugas serta masih ditemukan adanya praktek percaloan dan pungli.
3. Pada saat evaluasi lapangan terdapat inkonsistensi pelayanan kepada publik menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata dilapangan.

Untuk itu dalam rangka mempercepat pelaksanaan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Agama, dihimbau kepada seluruh satuan kerja untuk melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Menjaga Konsistensi dan meningkatkan kualitas implementasi pembangunan zona integritas secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemahaman dan internalisasi terkait dengan pembangunan zona integritas dan meningkatkan konsistensi implementasi pelayanan dengan cara :
 - a. Sosialisasi enam (6) area perubahan.
 - b. Pemasangan benner budaya kerja dan nilai-nilai organisasi;
 - c. Melakukan monev secara berkala perihal pembangunan zona integritas khususnya di enam area perubahan;

3. Meningkatkan program/kegiatan terkait dengan pencegahan korupsi dan melakukan kampanye secara massif atas program tersebut, sehingga penerima layanan dapat mengetahui dan merasakan perubahan yang sudah dilakukan oleh satuan kerja.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani.

Wassalam
Ketua

Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. 

Tembusan Yth:

Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.